

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi mendorong industri bergerak ke arah yang kian beragam dan penuh tantangan, sehingga tingkat kompleksitasnya pun terus meningkat seperti kemajuan teknologi informasi, serta dinamika regulasi yang kian menuntut perusahaan untuk dikelola secara profesional dan bertanggung jawab (Kadir, 2025, p. 53). Orientasi perusahaan saat ini diarahkan dalam jangka panjang yakni menjaga keberlanjutan bisnis serta bisa membangun kepercayaan dari para pihak berkepentingan, jadi tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan dalam jangka pendek. Kepercayaan tersebut menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas operasional perusahaan, terutama di tengah dinamika usaha yang penuh tantangan, disertai tingginya risiko serta ketidakpastian.

Praktik tata kelola perusahaan yang baik berperan sebagai pijakan utama dalam mendukung tuntutan tersebut (Wahyoedi *et al.*, 2024). Tata kelola perusahaan menjadi kerangka yang mengarahkan dan menyelaraskan hubungan antara pemilik perusahaan, manajemen, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya agar kepentingan seluruh pihak dapat terlindungi secara seimbang (Triprasetyo & Priono, 2024). Pelaksanaan tata kelola perusahaan bertumpu pada prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, tanggung jawab, kemandirian, serta keadilan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan (Mahsina *et al.*, 2025, p. 47). Implementasi prinsip-prinsip tersebut diyakini mampu meminimalkan praktik penyimpangan dan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap manajemen.

Wujud utama dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat dilihat dari seberapa baik laporan keuangan disusun dan disajikan. Penyajian laporan keuangan yang jujur dan dapat diandalkan menjadi sarana pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan serta sumber

informasi utama bagi investor, kreditur, regulator, dan pihak eksternal lainnya (Nugraha & Andhaniwati, 2024). Penilaian kinerja entitas bisnis, tinggi rendahnya risiko maupun prospek usaha di masa mendatang menggunakan informasi yang dijelaskan dalam laporan keuangan (Lestari *et al.*, 2025, p. 81). Kualitas laporan keuangan dengan demikian memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

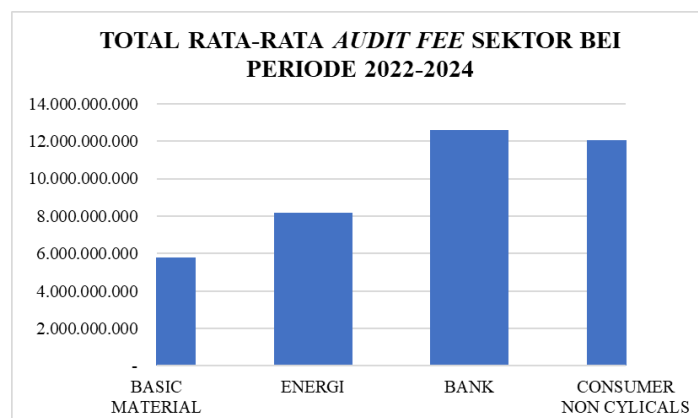
Agency theory memandang hubungan yang tidak selalu sama antara pemilik dan manajemen. Hal ini disebabkan karena masing-masing memiliki tujuan berbeda serta akses informasi yang tidak seimbang, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen kerap terdorong untuk mengambil tindakan yang lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, yang belum tentu sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Kondisi tersebut mengharuskan adanya fungsi pengawasan yang kuat agar keputusan manajemen tetap sejalan dengan kepentingan perusahaan. Keberadaan audit independen menjadi salah satu instrumen kunci dalam mereduksi potensi konflik keagenan sekaligus meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan (Christiana *et al.*, 2021).

Peran auditor independen tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai *audit fee*. *Audit fee* dapat diartikan sebagai bentuk pembayaran (imbalan) yang didapatkan auditor atas jasa audit yang diberikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan (El-Gammal, 2012). Besaran *audit fee* sering mencerminkan rumitnya proses pemeriksaan serta tingkat risiko audit, serta intensitas usaha audit yang dilakukan. Dalam perspektif teoretis, *audit fee* yang lebih besar biasanya mencerminkan cakupan dan kedalaman pemeriksaan yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menghasilkan kualitas audit yang lebih optimal (Carson *et al.*, 2022). Besaran *audit fee* dengan demikian menjadi isu penting dalam menjaga keseimbangan antara kualitas audit dan independensi auditor.

Kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa penyajian informasi terkait *audit fee* dalam laporan keuangan pada umumnya belum bersifat wajib, melainkan bergantung pada kebijakan perusahaan untuk mengungkapkannya

(*voluntary disclosure*). Keterbatasan pengungkapan tersebut menyebabkan pengguna laporan keuangan memiliki informasi yang tidak lengkap mengenai hubungan ekonomi antara perusahaan dan auditor. Merujuk dari IAPI No. 2 Tahun 2016, *audit fee* yang ditentukan terlalu rendah bisa memicu adanya keraguan terhadap kemampuan atau kompetensi dari auditor yang melakukan jasa audit terhadap suatu laporan keuangan (IAPI, 2016). Selain itu, bisa memunculkan keraguan lainnya seperti objektivitas auditor akibat ketergantungan ekonomi jika penetapan *audit fee* terlalu tinggi, sehingga *audit fee* memiliki implikasi langsung terhadap persepsi kualitas audit.

Pengungkapan informasi *audit fee* dengan demikian memiliki makna penting bagi investor dan publik karena informasi tersebut mencerminkan hubungan ekonomi antara auditor dan klien. Transparansi audit yang mencakup informasi terkait biaya audit memungkinkan investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai tingkat independensi auditor serta kualitas audit yang dihasilkan. *Audit fee* yang diungkapkan secara memadai, mengakibatkan investor memperoleh sinyal mengenai intensitas prosedur audit dan tingkat kehati-hatian auditor dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Makna tersebut menjadi semakin relevan ketika *audit fee* menunjukkan perkembangan tertentu dari waktu ke waktu, karena perubahan *audit fee* dapat memengaruhi persepsi investor dan publik terhadap kualitas audit dan independensi auditor (Al-Shaer *et al.*, 2022; Johl *et al.*, 2021).



Gambar 1.1 Rata-Rata *Audit Fee* Beberapa Sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022-2024

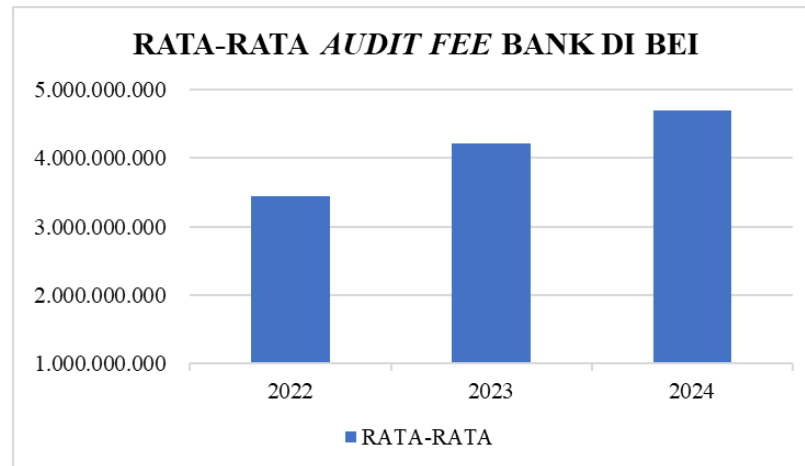
Sumber: Data diolah

Perbandingan *audit fee* antar sektor di Bursa Efek Indonesia membuktikan terdapat perbedaan yang cukup jelas. Data rata-rata periode 2022-2024 pada Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa industri perbankan memiliki *audit fee* paling tinggi dibandingkan sektor *basic material, energy*, dan *consumer non-cyclicals*. Kondisi ini berkaitan erat dengan karakteristik industri perbankan yang memiliki struktur transaksi kompleks, volume aktivitas yang tinggi, serta pengawasan regulator yang ketat (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Kompleksitas tersebut mengharuskan auditor menjalankan langkah-langkah pemeriksaan dengan ruang lingkup yang lebih menyeluruh serta mendalam dibandingkan sektor lainnya. Ruang lingkup audit yang lebih besar tersebut secara wajar berdampak pada besaran tingkat imbalan audit yang lebih tinggi.

Tingginya nilai pembayaran jasa audit pada industri perbankan juga berjalan seiring dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan *audited*. Bank-bank besar di Indonesia, termasuk bank BUMN dan Bank Central Asia, secara konsisten mampu mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit pada bulan Januari hingga Februari. *Audit fee* yang relatif lebih tinggi memungkinkan penggunaan sumber daya audit yang lebih memadai, baik dari sisi jumlah personel maupun intensitas prosedur pemeriksaan. Alokasi sumber daya tersebut mendukung proses pelaksanaan audit yang lebih tertata dan optimal, sehingga proses penyelesaiannya dapat berlangsung dengan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Ketepatan waktu ini mencerminkan koordinasi yang baik antara manajemen dan auditor eksternal (Nkansa, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *audit fee* yang tinggi pada industri perbankan tidak hanya menggambarkan besarnya biaya audit, tetapi juga berkaitan dengan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Karakteristik inilah yang memperkuat relevansi industri perbankan untuk dikaji lebih lanjut dalam melihat bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan memengaruhi penetapan *audit fee*. Pemahaman terhadap hubungan tersebut menjadi penting untuk menjelaskan faktor-faktor internal

perusahaan yang berkontribusi terhadap variasi *audit fee* pada industri perbankan.



Gambar 1.2 Rata-Rata *Audit Fee* Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022-2024

Sumber: Data diolah

Peristiwa *audit fee* pada subsektor perbankan di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan selama periode pengamatan. Berdasarkan Gambar 1.2, biaya audit terus mengalami kenaikan pada perusahaan bank di BEI, yakni sebesar 22% saat 2022-2023, dan kembali mengalami kenaikan sebesar 11% pada tahun selanjutnya. Peningkatan *audit fee* periode 2022-2023 terlihat relatif lebih signifikan dibandingkan periode berikutnya, yang mengindikasikan adanya perubahan kondisi audit pada industri perbankan. Tren kenaikan tersebut dapat mencerminkan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha, dinamika risiko audit, serta tuntutan terhadap kualitas audit pada industri perbankan yang berada dalam pengawasan regulator yang ketat.

Tahun 2023 merupakan tahun yang menunjukkan adanya perubahan kerangka regulasi sektor keuangan, termasuk implementasi awal Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Perubahan lingkungan regulasi tersebut berpotensi memengaruhi dinamika pengawasan dan pengelolaan risiko pada perbankan, yang dalam praktiknya dapat berdampak pada lingkungan audit

dan kebutuhan evaluasi oleh auditor. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu konteks yang relevan dalam memahami peningkatan *audit fee* pada periode tersebut. Penelitian Carson *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa kenaikan *audit fee* umumnya dipengaruhi oleh meningkatnya risiko audit, kompleksitas transaksi, serta permintaan atas kualitas audit yang lebih tinggi dari perusahaan dan pemangku kepentingan.

Tren peningkatan *audit fee* dapat dimaknai secara beragam berdasarkan sudut pandang investor dan publik. *Audit fee* yang meningkat dapat dipersepsikan sebagai sinyal bahwa auditor menjalankan langkah-langkah audit dengan ruang lingkup yang semakin luas disertai pendalaman pemeriksaan yang lebih intensif sebagai respons atas meningkatnya risiko dan kompleksitas perusahaan, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas audit dan kredibilitas laporan keuangan. Penelitian Friedrich *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa tingginya *audit fee* umumnya diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa proses audit dilakukan dengan upaya yang lebih intens serta menghasilkan kualitas pemeriksaan yang lebih baik.

Audit fee yang relatif tinggi juga berpotensi menimbulkan persepsi negatif apabila dipandang muncul hubungan ekonomi yang kuat antara auditor dan klien yang dapat memicu keraguan terhadap kemampuan auditor dalam menjaga independensinya. Kondisi berbeda, besaran *audit fee* yang terlalu kecil berpotensi menimbulkan persepsi negatif dari publik terhadap kecukupan upaya audit dan kualitas pemeriksaan yang dilakukan auditor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *audit fee* tidak sekadar menjadi pembayaran atas jasa pemeriksaan laporan keuangan, melainkan juga berfungsi sebagai informasi yang diperhatikan oleh investor dan publik dalam menilai independensi auditor, kualitas audit, serta kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan (Friedrich *et al.*, 2024).

Upaya menjaga kualitas audit dan meminimalkan konflik keagenan menempatkan mekanisme *corporate governance* sebagai faktor yang sangat penting (Surbakti & Sari, 2024). Struktur dan karakteristik dewan serta

komite audit diyakini mampu memengaruhi kebijakan perusahaan terkait pengawasan pelaporan keuangan dan hubungan dengan auditor eksternal. Keberagaman gender dalam struktur dewan (*board gender diversity*) dipandang mampu memperkaya sudut pandang, meningkatkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat fungsi monitoring terhadap manajemen (Yuniarti *et al.*, 2021). Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat permintaan perusahaan terhadap kualitas audit dan besaran *audit fee* yang dibayarkan. Selain itu, mekanisme tata kelola perusahaan lainnya yang tidak kalah penting adalah independensi dewan komisaris, yang mencerminkan tingkat objektivitas pengawasan terhadap manajemen. Struktur dewan yang lebih independen umumnya dikaitkan dengan peningkatan kualitas monitoring serta perubahan dalam persepsi risiko auditor terhadap perusahaan (Muniandy, 2022).

Struktur dan karakteristik komite audit turut menentukan efektivitas pengawasan perusahaan, termasuk dalam mendukung proses audit eksternal (Hakim & Budiwitjaksono, 2023). Keahlian komite audit (*audit committee expertise*) berlatar belakang akuntansi dan keuangan membantu menghasilkan penilaian yang lebih tepat terhadap mutu proses audit. Aktivitas komite audit (*audit committee activity*) yang tercermin dari frekuensi rapat menunjukkan intensitas pengawasan yang dilakukan terhadap proses pelaporan keuangan, sehingga secara keseluruhan karakteristik tersebut diyakini dapat memengaruhi besaran imbalan jasa audit yang ditanggung oleh perusahaan (Afenya *et al.*, 2022).

Audit fee dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk elemen penting dalam proses audit independen karena mencerminkan tingkat risiko audit, kompleksitas pemeriksaan, serta intensitas upaya yang dilakukan auditor dalam memberikan jasa audit. Perspektif ekonomi audit menjelaskan bahwa auditor akan mempertimbangkan berbagai faktor internal perusahaan sebelum menentukan besaran *audit fee*, termasuk risiko salah saji material, kualitas *internal control*, maupun efektivitas mekanisme *good corporate governance*. Efektivitas tata kelola yang baik dapat memengaruhi cara pihak

eksternal menilai risiko audit, sehingga nantinya berpengaruh terhadap besar kecilnya *audit fee* yang dibebankan untuk emiten (Zielma & Tjaraka, 2024).

Salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang berpotensi memengaruhi *audit fee* adalah keberagaman gender dalam struktur dewan (*board gender diversity*). Keterlibatan perempuan dalam dewan direksi sering dipandang membawa pendekatan yang lebih cermat, disertai perhatian yang lebih tinggi terhadap risiko, serta orientasi yang lebih kuat terhadap etika dan kepatuhan (Yuniarti *et al.*, 2021). Karakteristik tersebut mendorong peningkatan kualitas pengawasan terhadap manajemen dan tahapan pelaporan keuangan sehingga turut membentuk standar yang diharapkan perusahaan terhadap kualitas audit dari auditor eksternal.

Ditinjau dari sudut pandang auditor eksternal, *board gender diversity* dapat memengaruhi *audit fee* melalui dua mekanisme yang berbeda. Keberagaman gender yang meningkatkan tuntutan atas transparansi dan kualitas laporan keuangan dapat mengarahkan auditor agar menjalankan proses audit dengan ruang lingkup yang lebih komprehensif dan tingkat kedalaman yang lebih tinggi sebagai respons atas ekspektasi dewan, sehingga *audit fee* cenderung meningkat. Namun, efektivitas pengawasan yang dihasilkan dari keberagaman tersebut juga dapat menurunkan risiko salah saji material, sehingga kebutuhan auditor untuk melakukan pengujian tambahan menjadi lebih rendah dan *audit fee* cenderung menurun (Bona-Sánchez *et al.*, 2024). Mekanisme inilah yang menyebabkan hubungan antara *board gender diversity* dan *audit fee* bersifat ambigu dan perlu diuji secara empiris.

Independensi dewan komisaris (komisaris independen) berperan sebagai salah satu alat krusial dalam sistem pengelolaan perusahaan yakni meminimalisir adanya benturan kepentingan baik dari pihak manajemen maupun pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Komisaris independen berperan dalam mengawasi jalannya perusahaan secara tidak memihak serta memastikan laporan keuangan disusun dengan kualitas yang baik yang lebih transparan. Keberadaan komisaris independen dengan demikian mencerminkan efektivitas tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Ditinjau dari perspektif auditor eksternal, tingkat independensi dewan dapat memengaruhi penilaian terhadap risiko audit. Pengawasan yang lebih efektif berpotensi menurunkan risiko salah saji material sehingga auditor dapat mengurangi cakupan pengujian tertentu dan menekan *audit fee* (Rahayu *et al.*, 2021). Namun di sisi lain, dewan yang lebih independen juga cenderung menuntut peningkatan standar kualitas audit sehingga membuat auditor cenderung menambah kedalaman serta memperketat prosedur pemeriksaan yang dilakukan dan pada akhirnya memengaruhi kenaikan *audit fee* (I. Kim *et al.*, 2023).

Perubahan dalam struktur independensi dewan juga bisa menjadi sinyal bagi auditor terkait kondisi risiko perusahaan. Penelitian Liu *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa perubahan pada independensi dewan berkorelasi dengan peningkatan *audit fee* karena auditor merespons peningkatan kondisi perusahaan yang diwarnai oleh berbagai ketidakpastian dan potensi risiko. *Audit fee* mampu dipengaruhi oleh komisariss independen dengan melalui dua mekanisme utama, yaitu penurunan risiko audit dan peningkatan tuntutan kualitas audit.

Karakteristik komite audit turut memegang fungsi yang krusial dalam memengaruhi proses audit dan penetapan *audit fee* selain dewan. Keahlian komite audit (*audit committee expertise*), khususnya berlatar belakang akuntansi dan/atau keuangan dapat membantu komite audit dalam memahami secara lebih mendalam terkait kesalahan dari pelaporan keuangan dan kualitas pekerjaan auditor. Komite audit yang memiliki keahlian memadai mampu mengajukan pertanyaan kritis, menantang pertimbangan profesional auditor, serta mendorong penggunaan standar audit yang lebih ketat (Afenya *et al.*, 2022).

Keahlian komite audit yang tinggi dapat mendorong auditor untuk meningkatkan cakupan dan kedalaman prosedur audit guna memenuhi tuntutan kualitas audit yang semakin baik, yang kemudian berdampak pada penyesuaian *audit fee* yang cenderung tinggi. Komite audit yang kompeten juga berperan dalam memperbaiki mekanisme pengendalian internal serta

mutu penyajian laporan keuangan perusahaan (Adam *et al.*, 2025, p. 61). Perbaikan tersebut dapat menurunkan risiko audit yang dirasakan auditor, sehingga mengurangi kebutuhan akan prosedur audit tambahan dan berpotensi menekan *audit fee*. Hubungan *audit committee expertise* dengan *audit fee* dengan demikian dipengaruhi oleh keseimbangan antara peningkatan tuntutan kualitas audit dan penurunan risiko audit.

Aktivitas komite audit (*audit committee activity*) yang tercermin dari frekuensi rapat juga berperan dalam memengaruhi *audit fee*. Komite audit yang aktif menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaan audit eksternal (Hajerng, 2025, p. 50). Tingkat aktivitas tersebut memungkinkan komite audit untuk mengidentifikasi lebih awal permasalahan akuntansi, membahas temuan auditor secara lebih mendalam, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi audit.

Aktivitas pengawasan yang tinggi dapat meningkatkan kebutuhan auditor untuk menyediakan informasi yang lebih rinci dan melakukan prosedur audit tambahan guna mendukung diskusi dan evaluasi komite audit, sehingga *audit fee* cenderung meningkat (Afenya *et al.*, 2022). Intensitas pengawasan yang konsisten juga berpotensi memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dan menurunkan risiko audit. Risiko audit yang lebih rendah memungkinkan auditor mengurangi cakupan pengujian tertentu dan menekan *audit fee*. Hubungan *audit committee activity* dengan *audit fee* dengan demikian bersifat kompleks dan bergantung pada efektivitas pengawasan yang dihasilkan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, *board gender diversity*, ciri-ciri komite audit yang mencakup kompetensi serta tingkat aktivitas, dan juga independensi dewan komisaris merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang memengaruhi *audit fee* melalui dua jalur utama, yaitu peningkatan tuntutan kualitas audit dan penurunan risiko audit. Jalur peningkatan kualitas audit mendorong auditor untuk memperluas prosedur pemeriksaan sehingga *audit fee* cenderung meningkat. Jalur penurunan risiko audit memungkinkan

auditor mengurangi intensitas pengujian sehingga *audit fee* berpotensi menurun. Kompleksitas hubungan tersebut menjadi semakin relevan dalam industri perbankan yang memiliki risiko tinggi, kompleksitas transaksi yang besar, serta pengawasan regulator yang ketat (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Kondisi subsektor perbankan yang memiliki pengawasan regulator yang ketat menjadikan *audit fee* sebagai indikator penting yang tidak hanya mencerminkan kualitas audit, tetapi juga tingkat kehati-hatian dan integritas sistem keuangan (Aulia *et al.*, 2025, p. 114). Berdasarkan kondisi tersebut, pengujian empiris mengenai pengaruh *board gender diversity*, independensi dewan komisaris serta karakteristik komite audit dalam memengaruhi *audit fee* pada subsektor perbankan menjadi penting untuk dipahami guna memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor penentu *audit fee*. Pemahaman tersebut diharapkan mampu menjembatani perbedaan temuan penelitian terdahulu serta menyumbang nilai tambah baik secara konseptual maupun praktis dalam upaya penguatan praktik tata kelola perusahaan dan praktik audit di Indonesia.

Temuan dari berbagai studi sebelumnya mengindikasikan bahwa dampak mekanisme tata kelola perusahaan terhadap *audit fee* masih belum menunjukkan kesimpulan yang konsisten. Drogalas *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa atribut komite audit, termasuk kompetensi di bidang keuangan, pengalaman, serta intensitas rapat berpengaruh positif terhadap *audit fee* karena peningkatan permintaan atas kualitas audit. Abu (2021) juga mengungkapkan bahwa tingkat aktivitas serta keberagaman komite audit memiliki hubungan positif dengan *audit fee*, yang menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal dapat bersifat komplementer terhadap peran auditor eksternal. Perbedaan konteks sektor dan regulasi menyebabkan temuan tersebut belum tentu sepenuhnya relevan bagi industri perbankan di Indonesia. Penelitian lain menunjukkan hasil yang berlawanan seperti Bona-Sánchez *et al.*, (2024) yang menerangkan terkait adanya keberagaman gender pada dewan direksi mampu memberikan pengaruh terhadap *audit fee* yakni berupa pengaruh negatif. Hal tersebut disebabkan karena efektivitas

pengawasan yang lebih kuat mampu menurunkan risiko audit dan kebutuhan jam audit auditor eksternal. Afenya *et al.*, (2022) juga membuktikan bahwa karakteristik komite audit, termasuk keahlian keuangan, *gender diversity*, dan frekuensi rapat, memberikan dampak negatif terhadap besaran *audit fee* pada perusahaan sektor keuangan yang berada dalam pengawasan ketat regulator.

Penelitian terdahulu mengenai *audit fee* umumnya mengembangkan model yang menempatkan mekanisme tata kelola perusahaan dalam satu jalur penjelasan dominan. Drogalas *et al.* (2021) dan Abu (2021) memposisikan karakteristik komite audit sebagai pendorong peningkatan permintaan atas kualitas audit, sehingga *audit fee* dipandang sebagai refleksi peningkatan intensitas dan cakupan prosedur audit auditor eksternal, sementara Bona-Sánchez *et al.* (2024) dan Afenya *et al.* (2022) menempatkan *board gender diversity* dan karakteristik komite audit sebagai faktor yang memperkuat pengawasan internal dan menurunkan persepsi risiko audit. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung memisahkan kedua mekanisme tersebut dalam kerangka konseptual yang berbeda dan sebagian besar dilakukan di luar konteks subsektor perbankan Indonesia, yang berada dalam lingkungan dengan tingkat regulasi yang ketat, kompleksitas transaksi yang tinggi, serta risiko sistemik yang memengaruhi kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan.

Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa sistem tata kelola perusahaan turut berperan dalam menentukan besaran *audit fee* yang ditetapkan. Sejumlah studi menguji pengaruh *board gender diversity* terhadap *audit fee* dan menemukan bahwa keberagaman gender dapat memengaruhi kualitas monitoring serta persepsi risiko auditor (Bona-Sánchez *et al.*, 2024). Sementara itu, penelitian Alves (2023) menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris turut memengaruhi *audit fee* melalui perubahan persepsi risiko auditor dan kebutuhan atas prosedur audit yang lebih luas. Penelitian lain menyoroti karakteristik komite audit, seperti keahlian keuangan, dan frekuensi rapat, yang juga terbukti berkaitan dengan besaran *audit fee* (Afenya *et al.*, 2022).

Walaupun demikian, banyak penelitian masih menguji *board gender diversity*, karakteristik komite audit, dan independensi dewan komisaris secara terpisah. Masih relatif terbatas studi yang mengintegrasikan kedua mekanisme tata kelola tersebut dalam satu model empiris terhadap *audit fee*. Pengujian model terintegrasi tersebut juga belum banyak dilakukan dalam konteks Indonesia, terutama dalam subsektor perbankan yang memiliki tingkat pengawasan dan kompleksitas operasional yang tinggi. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk mengetahui pengaruh *board gender diversity*, independensi dewan komisaris dan *audit committee characteristics* terhadap *audit fee* pada bank di Indonesia dalam studi ini.

Pemilihan subsektor perbankan sebagai objek penelitian memiliki dasar konseptual dan empiris yang kuat. Industri perbankan merupakan subsektor yang sangat diatur dimana memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi, serta mengandung risiko sistemik yang berdampak luas terhadap perekonomian. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan atas audit berkualitas tinggi menjadi sangat penting, sehingga *audit fee* berfungsi sebagai indikator yang merefleksikan risiko audit, intensitas pengawasan, dan upaya audit yang dilakukan auditor. Aktivitas perbankan Indonesia hingga pertengahan tahun 2024 menunjukkan skala usaha yang besar dan pengawasan regulator yang intensif, tercermin dari pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga serta penerbitan berbagai ketentuan perbankan yang memperkuat kerangka regulasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *audit fee* pada industri perbankan tidak hanya menggambarkan besaran imbalan jasa audit, tetapi juga merefleksikan penilaian auditor terhadap tingkat risiko audit dan risiko sistemik yang melekat pada bank. Industri perbankan memiliki peran sentral dalam sistem keuangan, sehingga kualitas dan keandalan laporan keuangan bank menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Penelitian Staszkievicz & Karkowska (2021) mengindikasikan bahwa *audit fee* pada subsektor perbankan berkaitan dengan mutu serta sentimen pelaporan

keuangan yang berperan dalam membentuk persepsi pasar terhadap kondisi dan stabilitas bank.

Audit yang lebih intensif, yang tercermin dari *audit fee* yang lebih tinggi, berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan bank di tengah kompleksitas transaksi dan pengawasan regulator yang ketat. Kredibilitas laporan keuangan memegang peranan penting dalam mempertahankan kepercayaan investor maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya, sehingga turut mendukung kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan (Noch *et al.*, 2025, p. 2). *Audit fee* pada subsektor perbankan memiliki implikasi yang lebih luas dibandingkan sektor nonkeuangan, sehingga hal tersebut membuat semakin relevan penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut.

Pentingnya penelitian ini semakin kuat karena di Indonesia pengungkapan *audit fee* masih dilakukan secara sukarela, sehingga pemahaman mengenai keterkaitan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan *audit fee* pada perbankan masih terbatas. Pemahaman mengenai determinan *audit fee* menjadi penting tidak hanya dari perspektif kualitas audit dan independensi auditor, tetapi juga dari sudut pandang penguatan tata kelola perusahaan dan stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan hal tersebut, studi ini semakin dibutuhkan untuk bisa menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi besaran biaya audit seperti keberagaman gender dalam dewan, komisaris independen, dan karakteristik komite audit khususnya di subsektor perbankan di Indonesia.

Novelty dari studi ini terletak pada pengembangan pendekatan penelitian yang memposisikan *board gender diversity*, independensi dewan komisaris serta karakteristik komite audit yang menjadi bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dimana dapat memengaruhi *audit fee* melalui dua jalur, yaitu peningkatan tuntutan terhadap kualitas audit dan penurunan persepsi risiko audit auditor eksternal. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung memfokuskan salah satu mekanisme secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan kedua jalur tersebut dalam satu

kerangka empiris pada industri perbankan Indonesia yang memiliki kompleksitas transaksi tinggi, risiko sistemik, dan pengawasan regulator yang ketat. Selain itu, penelitian ini menguji hubungan tersebut pada periode pengamatan terbaru setelah penguatan regulasi perbankan, sehingga harapannya nanti dapat memberikan pemahaman lebih jelas terkait hal-hal yang memengaruhi penetapan *audit fee* khususnya pada perusahaan bank di Indonesia.

Mengacu penjelasan sebelumnya, maka ditetapkan judul dari penelitian ini yaitu “Pengaruh *Board Characteristics* dan *Audit Committee Characteristics* Terhadap *Audit Fee* Pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024”. Selanjutnya, studi ini diantisipasi mampu menyumbangkan teoritis untuk pertumbuhan literatur di bidang akuntansi dan pengelolaan perusahaan, serta sumbangan praktis untuk badan pengatur, subsektor perbankan, dan profesi audit dalam memahami determinan *audit fee* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi dan menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *board gender diversity* berpengaruh terhadap *audit fee* pada bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022 hingga 2024?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *audit fee* pada bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022 hingga 2024?
3. Apakah *audit committee expertise* berpengaruh terhadap *audit fee* pada bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022 hingga 2024?
4. Apakah *audit committee activity* berpengaruh terhadap *audit fee* pada bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022 hingga 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna menghasilkan bukti empiris terkait peran mekanisme tata kelola perusahaan dalam memengaruhi besaran *audit fee* pada subsektor perbankan. Secara lebih rinci, penelitian ini diarahkan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh *board gender diversity* terhadap *audit fee* pada bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *audit fee* pada bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh *audit committee expertise* terhadap *audit fee* pada bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh *audit committee activity* terhadap *audit fee* pada bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi dan tata kelola perusahaan dengan mengintegrasikan *board gender diversity*, komisaris independen, dan karakteristik komite audit dalam satu model empiris terhadap *audit fee*. Pendekatan ini memberikan pengembangan konseptual dengan menjelaskan bahwa *audit fee* dapat terbentuk melalui dua jalur, yaitu peningkatan tuntutan terhadap kualitas audit dan penurunan persepsi risiko audit oleh auditor eksternal.

Penelitian ini juga menyajikan bukti empiris pada subsektor perbankan di Indonesia yang ditandai oleh tingkat regulasi tinggi, kompleksitas transaksi besar, dan risiko sistemik yang signifikan, sehingga dapat memperluas pemahaman teoritis mengenai determinan *audit fee* pada sektor yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan sektor

nonkeuangan. Temuan penelitian ini turut memperkuat relevansi *agency theory* dalam menjelaskan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan berperan sebagai alat monitoring untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, yang kemudian memengaruhi kebutuhan audit eksternal serta penentuan *audit fee*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Regulator

Studi ini diharapkan bisa memberikan dasar tambahan dalam menilai efektivitas penerapan tata kelola perusahaan di subsektor perbankan, terutama mengenai kualitas audit yang didukung dari kontribusi dewan direksi dan komite audit. Selain itu, dapat menjadi bahan pertimbangan terkait pentingnya keterbukaan pengungkapan *audit fee* secara konsisten dalam laporan tahunan.

b. Bagi Industri Perbankan

Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa struktur dan karakteristik dewan serta komite audit tidak sekadar menjadi perangkat formal dalam sistem tata kelola, melainkan juga dapat memengaruhi persepsi risiko auditor dan kebijakan *audit fee*. Pemahaman ini dapat mendukung manajemen dalam meningkatkan kualitas tata kelola guna mendukung kredibilitas laporan keuangan.

c. Bagi Profesi Auditor

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana karakteristik *corporate governance* klien, khususnya keberagaman gender dewan, independensi dewan dan kekuatan komite audit, memengaruhi proses penilaian risiko dan penetapan *audit fee*. Hal ini dapat membantu auditor dalam mempertimbangkan faktor tata kelola secara lebih sistematis dalam proses audit.

d. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Studi ini diharapkan mampu membantu investor memahami bahwa *audit fee* tidak hanya mencerminkan biaya jasa audit, tetapi juga

berkaitan dengan struktur pengawasan internal perusahaan dan kualitas mekanisme tata kelola yang dimiliki bank.